

Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Program Ketahanan Pangan Di Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan

Riyan Ramadhan, Khumaidi

¹²Universitas Yudharta Pasuruan

Email: *rr8568148@gmail.com, khumaidi@yudharta.ac.id*

Abstract

This study examines the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in strengthening the food security program in Pucangsari Village, Purwosari District, Pasuruan Regency. The study was conducted by Riyan, a Public Administration student at Yudharta University, Pasuruan, in August 2025. The main objective of the study was to determine and describe the role of BUMDes in supporting food security in the village. This study used a descriptive design with a qualitative approach. Data collection was carried out through direct observation, documentation, and interviews with relevant parties, including BUMDes managers and the village community. BUMDes is an institution established by the village government with the primary function of driving the community's economy. In the context of food security, the existence of BUMDes is strategic because it can provide assistance to farmers, provide supporting facilities, and assist in the management of agricultural products. The results indicate that BUMDes in Pucangsari Village has performed its role well in supporting the food security program. However, this role can still be improved to be more optimal. Going forward, BUMDes is expected to focus not only on facilitating and mentoring farmers, but also on developing new innovations by processing agricultural products into economically valuable derivative products, such as corn, which can be processed into animal feed, flour, and other processed products. Thus, BUMDes has significant potential to strengthen economic independence while supporting the sustainability of village food security.

Keywords: BUMDes, Food Security, Pucangsari Village.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam penguatan program ketahanan pangan di Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Penelitian dilakukan oleh Riyan, mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Universitas Yudharta Pasuruan pada Agustus 2025. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui sekaligus mendeskripsikan bagaimana peran BUMDes dalam mendukung ketahanan pangan di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi langsung, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait, baik pengelola BUMDes maupun masyarakat desa. BUMDes merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa dengan fungsi utama sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dalam konteks ketahanan pangan, keberadaan BUMDes menjadi strategis karena mampu memberikan pendampingan kepada petani, menyediakan fasilitas penunjang, serta membantu dalam pengelolaan hasil pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Desa Pucangsari telah menjalankan perannya dengan baik dalam mendukung

program ketahanan pangan. Namun, peran tersebut masih dapat ditingkatkan agar lebih optimal. Ke depan, BUMDes diharapkan tidak hanya fokus pada fungsi fasilitator dan pendampingan petani, tetapi juga mampu mengembangkan inovasi baru melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan yang bernilai ekonomis, seperti jagung yang dapat diolah menjadi pakan ternak, tepung, maupun produk olahan lainnya. Dengan demikian, BUMDes berpotensi besar dalam memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus mendukung keberlanjutan ketahanan pangan masyarakat desa.

Kata kunci: Bumdes, Ketahanan Pangan, Desa Pucangsari.

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang didirikan oleh desa dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa bersama masyarakat, dengan tujuan untuk mengelola potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kesejahteraan warga desa. BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, serta menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan usaha yang bersifat produktif, berkelanjutan, dan partisipatif. Secara legal, pendirian BUMDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Melalui BUMDes, desa diharapkan mampu mengelola sumber daya secara optimal, untuk mengurangi ketergantungan pada pihak luar, dan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir dari semangat kemandirian desa dalam mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Gagasan mengenai pendirian BUMDes mulai mengemuka seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan berbasis desa, yang kemudian diwujudkan secara resmi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menjadi landasan hukum pertama yang secara eksplisit mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan BUMDes sebagai entitas usaha milik desa. pendirian BUMDes yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwasanya, desa dapat mendirikan BUMDes sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat dari adanya BUMDes. Setelah UUDesa diberlakukan, desa secara legal memperoleh kewenangan untuk mendirikan BUMDes sebagai sarana peningkatan ekonomi lokal dan pendapatan asli desa.

Dalam perkembangannya, pemerintah juga mengeluarkan regulasi pendukung seperti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 yang memperkuat struktur, pengelolaan, serta pemantauan BUMDes di seluruh Indonesia. Sejak itu, BUMDes berkembang pesat di berbagai daerah dan menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Desa Pucangsari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Sebagai bagian dari wilayah pedesaan yang memiliki luas keseluruhan sekitar 300 Hektar lebih. Kemudian dibagi untuk luas pemukiman sekitar kurang lebih 60 Ha, beserta pekarangan rumah, dan pertanian dengan luas lahan kurang lebih sekitar 240 Ha yang ditanami padi dan jagung dengan presentase perbandingan 30% lahan untuk padi dan 70% untuk lahan pertanian dari jagung. dengan luas yang diperkirakan untuk luas lahan padi mencapai 72 Ha, dan luas dari lahan pertanian jagung sekitar 168 Ha.

Desa Pucangsari. (2017, Februari 23). Profil Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari: Aspek sumber daya alam. Wordpress. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan lahan pertanian yang luas, Desa Pucangsari memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekonomi lokal secara mandiri. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam program ketahanan pangan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. BUMDes berperan sebagai lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk mengelola potensi dan aset desa secara produktif, serta menjadi motor penggerak kegiatan usaha yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes yang baik dan terarah di Desa Pucangsari diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kemandirian ekonomi desa secara berkelanjutan.

Kondisi ketahanan pangan di Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, saat ini menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan berkat upaya kolaboratif antara pemerintah, petani, dan masyarakat. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi tanaman pangan telah berhasil meningkatkan ketersediaan pangan di desa. Infrastruktur pendukung seperti jalan dan irigasi yang terus diperbaiki juga memungkinkan distribusi hasil pertanian lebih efisien. Selain itu, Inisiatif untuk mengembangkan pertanian berbasis lokal dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat juga menunjukkan hasil positif, dengan semakin banyaknya petani lokal yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Dengan dukungan yang terus-menerus dan komitmen dari semua pihak, Desa Pucangsari berhasil menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam menciptakan ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan untuk masyarakat yang lebih sejahtera dengan tercukupi segala kebutuhan pangannya. Upaya ini tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Prabowo Subianto, sebagai seorang presiden di Republik Indonesia, menekankan akan pentingnya ketahanan pangan sebagai pondasi utama bagi keamanan dan kedaulatan suatu negara. Dalam pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Pidato tersebut berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2024, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta. Acara tersebut disiarkan secara langsung oleh berbagai stasiun televisi nasional dan dapat diakses melalui kanal berita daring seperti Kompas.com dan DetikNews. Menurutnya, ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga tentang kemampuan negara untuk memproduksi dan mendistribusikan pangan secara mandiri dan berkelanjutan. Prabowo berpendapat bahwa ketergantungan pada impor pangan dapat melemahkan posisi antar negara dan meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global. Oleh karena itu, ia mendorong pengembangan pertanian dalam negeri yang kuat dan modern, peningkatan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kapasitas petani lokal. Dengan demikian, Prabowo yakin bahwa Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang kokoh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kedaulatan nasional. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 mengatakan bahwa “Ketahanan Pangan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh rakyat secara berkelanjutan. Strategi ini mencakup peningkatan produksi pangan, pengelolaan sumber daya alam, perbaikan distribusi pangan, serta peningkatan kualitas gizi masyarakat

melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan”.

BUMDes Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, memainkan peran penting dalam pengelolaan program ketahanan pangan di desa. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan sumber daya desa, Bumdes Pucangsari dapat meningkatkan produksi dan distribusi pangan yang efektif. Melalui kegiatan seperti penyediaan pengembangan pertanian terintegrasi, pengelolaan lumbung pangan desa, dan pelatihan bagi petani lokal, Bumdes membantu meningkatkan ketersediaan pangan yang bergizi dan terjangkau bagi masyarakat desa. Selain itu, Bumdes juga berperan dalam meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat desa melalui pemasaran hasil pertanian yang lebih baik dan pengembangan usaha mikro. Dengan demikian, Bumdes Pucangsari menjadi salah satu pilar utama dalam upaya mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan di Desa Pucangsari.

Dampak dari adanya program ketahanan pangan di Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, sangat dirasakan oleh masyarakat desa. Program ini telah meningkatkan ketersediaan pangan yang bergizi dan terjangkau, mengurangi risiko kelaparan dan malnutrisi, serta meningkatkan pendapatan petani lokal melalui peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian yang lebih baik. Selain itu, program ini juga memicu pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan demikian, masyarakat Desa Pucangsari dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan sehat, serta memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau. Kesejahteraan menjadi instrumen penting dan sentral didalam sebuah kehidupan manusia khususnya masyarakat yang berada di desa pucangsari, kecamatan purwosari, kabupaten pasuruan ini.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu fokus utama didalam penelitian ini. Terkait dengan upaya pengoptimalan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam hal ketahanan pangan, dan keberhasilan operasional BUMDes, baik dari sisi manajerial, administrasi, maupun inovasi usaha BUMDes dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana BUMDes dikelola secara efektif dan profesional, Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi strategis yang dapat digunakan untuk memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, dan model usaha BUMDes. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan BUMDes dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kemandirian ekonomi desa, dan menciptakan dampak pembangunan yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan yaitu peneliti kualitatif deskriptif yang mana data yang dihasilkan dari hasil penelitian dan analisis kritis dari suatu kejadian yang telah di amati di lapangan baik data berupa Observasi,Wawancara dan juga Dokumentasi. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman, (2014). dan teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut yang Pertama Pengumpulan Data Kedua Reduksi Data Ketiga Penyajian Data dan Keempat Penarikan Kesimpulan. Untuk mendapatkan informasi tersebut peneliti melakukan observasi, wawancara kepada partisipan yaitu kepala desa pucangsari Bpk

Suprpto beserta perangkat dan juga bumdes desa pucangsari. melalui pertanyaan umum hingga luas, serta dokumentasi, kemudian di kumpulkan dan di analisis yang nantinya data-data tersebut di tuangkan dalam bentuk laporan tertulis.

Jenis dan Sumber Data yang digunakan oleh penulis ialah jenis Penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif agar data penelitian yang didapat lebih akurat. Menurut Arikunto (2013:172), sumber data merupakan subjek dari mana data dalam penelitian diperoleh. Maka sumber data sangat penting diketahui agar data yang diperlukan diperoleh secara tepat. Sehingga, bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, data yang diperoleh dapat dikelompokkan kedalam dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari kegiatan wawancara dan observasi terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, dalam penelitian ini informannya adalah Kepala desa dan perangkat serta juga dengan pihak pengelola BUMDes Desa Pucangsari Dwi Pramono.

Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur, dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. seperti Dokumen mengenai peraturan desa, AD/ART Bumdes Pucangsari, laporan pertanggung jawaban, struktur organisasi dan beberapa dokumen berkaitan dengan persoalan yang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam suatu penelitian. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel guna mendukung analisis dan pengambilan kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi , yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melaksanakan Penelitian pada BUMDes secara langsung di lokasi penelitian. dan observasi ini difokuskan pada bagaimana tata kelola badan usaha milik desa Pucangsari “Lumbung Arto” dan apa saja yang dilakukan oleh Bumdes terkait dengan ketahanan pangan yang ada di Desa Pucangsari.

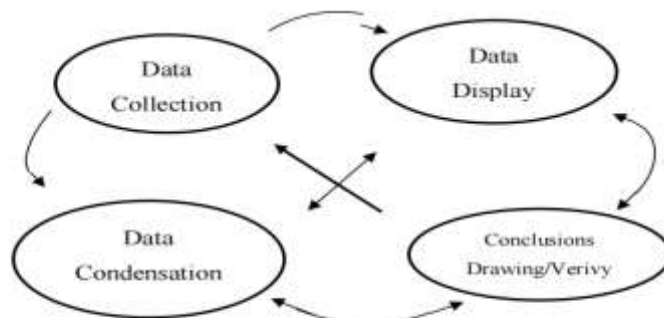
Wawancara Menurut Yulianto Kadjie (2016:147). Dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara berkenaan dengan fokus dan sub fokus penelitian. Semua hasil wawancara dibuat transkrip dan disimpan dalam file teks. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi Seputar BUMDes karena tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi. Sehingga peneliti harus mengajukan pertanyaan misalnya terkait dengan bagaimana kondisi ketahanan pangan di desa pucangsari saat ini, kemudian bagaimana peranan BUMDes dalam menciptakan ketahanan pangan di desa pucangsari, dll. sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dibuat kepada pihak terkait Seperti Kepala Desa pucangsari yaitu Bpk Suprpto beserta perangkat yang terkait, dan juga BUMDes sesuai dengan fokus penelitian yaitu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan program ketahanan pangan.

Pada penelitian ini, tipe wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu jenis wawancara yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi masalah secara terbuka. Pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi narasumber, namun tetap berfokus pada inti permasalahan yang sedang diteliti." dan dalam wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan kepada narasumber Sugiyono, (2010). Peneliti membutuhkan metode wawancara ini untuk menguatkan kognisi dan asumsi subjek yang diteliti ini.

Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip (dokumen), karena dokumen merupakan

sumber data yang berupa bahasa tertulis, ataupun foto. Menurut Kadjie Yulianto (2016:147) merupakan penjajakan, inventirasi dan validasi dokumen yang relevan agar pelaksanaan tahapan penelitian berlangsung dengan dukungan dokumen yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Dokumentasi bisa berupa gambar, bacaan, rekaman audio, dan arsip dokumen dll. Dan disini Peneliti mendapatkan beberapa dokumen seperti peraturan desa, AD/ART Bumdes Pucangsari “Lumbang Arto”, laporan pertanggung jawaban, struktur organisasi dan beberapa dokumen yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.

Analisis data adalah bagian dari pengolahan data. Menganalisis hasil analisis data, yaitu mengevaluasi hubungan antara data dan latar belakang yang menghasilkan persamaan atau perbedaan. Tujuan analisis adalah untuk menyelesaikan dan memberikan solusi untuk setiap rumusan masalah yang telah dibuat. Analisis data yang digunakan peneliti menggunakan analisis model interaktif Miles & Huberman (2014), berikut ini gambar komponen analisis data:



Gambar 3.1

Analisis Model Interaktif Miles & Huberman (2014) dalam (Kadji 2016),
yang telah digambar ulang oleh peneliti.

Pertamama reduksi data yang dimaksud yaitu proses pemilahan data, peringkasan data. Dalam penelitian ini data yang dimaksud yaitu data hasil observasi, hasil wawancara dan dokumen. Dan data yang di peroleh oleh peneliti dari penelitian berupa perdes (peraturan desa) yang memuat tentang pendirian badan usaha milik desa, AD/ART BUMDes Pucangsari, laporan pertanggung jawaban Bumdes dll. Kemudian hasil dari wawancara yang dilakukan kepada Narasumber yaitu bapak Suprpto selaku kepala desa Pucangsari, beserta beberapa perangkat desa pucangsari. selanjutnya wawancara kepada direktur bumdes dan beberapa anggota bumdes Pucangsari. Kedua penyajian data (*display data*) yaitu data yang telah direduksi tersebut kemudian disesuaikan dengan masalah yang dihadapi dan disajikan dalam bentuk tabel, bagan, maupun tulisan sesuai dengan kategorinya. Data yang disajikan dalam bentuk bagian seperti struktur organisasi pemerintah Desa, BUMDes Desa Pucangsari, data seperti perdes, AD/ART peneliti menyajikan dalam bentuk gambar kemudian data seperti aspek sumderdaya alam akan peneliti paparkan dalam bentuk tabel. Data yang disajikan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan tata kelola badan usaha milk desa Pucangsari dalam ketahanan pangan.

Ketiga verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan adalah proses akhir dalam penelitian yang bertujuan untuk merangkum dan menyimpulkan hasil dari analisis data yang telah dikumpulkan. Dalam tahapan ini ditarik kesimpulan dari katagori-katagori data yang telah direduksi, namun data tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang kurang valid

dan kredibel. Dan ada beberapa cara yang dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama sehingga ditemukannya data yang maksimal dalam proses penarikan kesimpulan untuk kemudian dapat diinterpretasikan.

Hasil dan Pembahasan

A. Administrasi Publik

Administrasi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks yang lebih luas, administrasi mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, pengambilan keputusan, dan koordinasi kegiatan dalam organisasi pemerintahan. Secara etimologis, kata "administrasi" berasal dari bahasa Latin *ad* yang berarti "kepada" dan *ministrare* yang berarti "melayani". Dengan demikian, administrasi dapat dimaknai sebagai kegiatan yang berorientasi pada pelayanan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut *The Liang Gie (2000:5)*, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Administrasi publik adalah suatu bidang ilmu dan praktik yang berkaitan dengan proses manajemen dalam organisasi pemerintahan serta pelaksanaan kebijakan publik. Administrasi publik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas pemerintah yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai tujuan negara. Administrasi publik juga dapat dipahami sebagai kegiatan yang melibatkan implementasi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif, serta berperan sebagai penghubung antara negara dan warga negara melalui penyediaan layanan publik. Menurut Dwight Waldo, administrasi publik tidak hanya menyangkut aspek teknis pemerintahan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan akuntabilitas.

Menurut Frederickson (1997:4), administrasi publik tidak hanya merupakan alat teknis dalam pengelolaan pemerintahan, tetapi juga merupakan instrumen etis dan politik yang mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang demokratis. Menurut Dwight Waldo (1955), administrasi publik bukanlah sekadar proses teknis dalam pemerintahan, melainkan suatu aktivitas yang sarat dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi. Ia menekankan bahwa administrasi publik harus dipahami sebagai bagian dari proses politik yang melayani kepentingan masyarakat dan mencerminkan nilai etis serta tanggung jawab publik. Merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya publik secara efektif, efisien, dan akuntabel guna mencapai tujuan-tujuan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam manajemen publik, peran aparatur negara adalah sebagai pelaksana kebijakan sekaligus pengelola pelayanan publik. Menurut Hughes (2003:5), "*Public management is the process of managing government services and institutions, using techniques and principles adapted from private sector management but modified for the public sector context.*" Artinya, manajemen publik mengambil prinsip dari manajemen sektor swasta, namun tetap disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik sektor publik.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dibentuk oleh desa dan dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa guna memperkuat perekonomian desa dan membangun kemandirian desa. BUMDes berperan sebagai sarana

untuk mengelola potensi lokal desa secara produktif dan berkelanjutan, serta menjadi wadah pengembangan usaha dan pelayanan kepada masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87 ayat (1) disebutkan bahwa: "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan." (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 87 ayat (1)).

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 4 Tahun 2015, dijelaskan bahwa: "BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa." (Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015, Pasal 1 Ayat 1). Dengan demikian, BUMDes memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui usaha yang dikelola secara mandiri oleh desa.

BUMDes yang ada di Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari ini bernama BUMDes "Lambung Arto" yang berdiri pada tanggal 25 Mei 2019. yang bergerak dalam bidang salah satunya yaitu pendampingan para petani desa pucangsari agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakatnya lewat pangan. jadi BUMDes ini mengelola sekiranya para petani di desa pucangsari ini berhasil dan sukses dalam menciptakan ketahanan pangan di dalam sebuah pertanian melihat desa yang memiliki luas lahan pertanian yang lebih dari cukup maka BUMDes hadir untuk membantu memaksimalkan hasil pertanian di desa pucangsari dengan cara menjadi distributor petani kepada pemerintah agar para petani lebih mudah dalam mendapatkan pasok pupuk untuk perawatan pertaniannya dan tidak hanya itu BUMDes juga menyuplai obat"tan seperti pestisida untuk membasmi hama sehingga perawatan dalam pertanian lebih efisien mulai dari penanaman hingga pasca-panen dan menghasilkan panen lebih melimpah dari sebelum adanya BUMDes dan sesudah adanya BUMDes di desa pucangsari.

C. Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Program Ketahanan Pangan Di Desa

Pucangsari

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) memiliki peran penting sebagai institusi ekonomi desa yang bertujuan untuk mendorong kemandirian desa melalui pengelolaan potensi lokal. Dalam konteks pengelolaan ketahanan pangan, Menurut *Ralph Linton (1936)*, "peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau lembaga berdasarkan status sosial yang dimilikinya. Dalam konteks ini, BUMDes memiliki status sebagai lembaga ekonomi desa, yang berperan mengelola potensi desa secara produktif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat desa". BUMDes berfungsi sebagai fasilitator dan pelaksana program-program strategis yang mendukung ketersediaan pangan, dan keberlanjutan pangan lokal. Maksud dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) berfungsi sebagai fasilitator dan pelaksana program-program strategis yang mendukung ketersediaan pangan dan keberlanjutan pangan lokal yaitu Sebagai fasilitator, BUMDes membantu masyarakat desa dalam mengembangkan potensi pangan lokal dengan memberikan akses ke sumber daya, pelatihan, dan teknologi yang relevan.

Sebagai pelaksana program strategis, BUMDes mengimplementasikan program-program yang mendukung ketersediaan pangan, seperti pengembangan pertanian berkelanjutan, pengelolaan pasca-panen, dan pemasaran produk pangan lokal. Contohnya, BUMDes dapat membantu petani lokal dengan menyediakan bibit unggul, pelatihan pertanian organik, dan akses ke pasar untuk hasil panen. BUMDes juga dapat membangun fasilitas pengolahan pasca-panen untuk mengurangi kerugian hasil pertanian dan meningkatkan nilai tambah produk pangan lokal. Dengan demikian, BUMDes berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Pucangsari melalui program-program strategis yang relevan dengan kebutuhan lokal. Ketahanan pangan, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, adalah kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau.

Pengelolaan Program ketahanan pangan oleh BUMDes diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya alam desa serta memberdayakan masyarakat melalui kegiatan produktif seperti pertanian, pengolahan hasil panen, dan pengelolaan lumbung pangan desa. Dengan pengelolaan yang baik, ketahanan pangan akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh teori kebutuhan dasar (*basic needs theory*) Maslow, A. H. (1943). *A theory of human motivation*. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. Yang menyatakan bahwa terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan menjadi dasar utama dalam mencapai kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, keberhasilan BUMDes dalam mengelola program ketahanan pangan di Desa Pucangsari dapat menjadi indikator penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Dalam konteks ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, kebutuhan pangan termasuk dalam tingkat pertama (fisiologis). Jika kebutuhan dasar seperti pangan tidak terpenuhi, maka masyarakat tidak dapat melanjutkan ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, program ketahanan pangan yang dikelola oleh BUMDes sangat penting sebagai langkah awal untuk memastikan kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana dijelaskan dalam teori Maslow seorang Teoritikus (penemu/perumus teori) asal Amerika Serikat. Yaitu Teori Kebutuhan Dasar (*Basic Needs Theory*) dari Abraham Maslow salah satu teori yang paling terkenal dan sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan manajemen maupun Pengelolaan. Teori yang berjudul "A Theory of Human Motivation". (Sebuah Teori tentang Motivasi Manusia) pada tahun 1943.

D. Program Ketahanan Pangan Untuk Masyarakat Desa

Ketahanan pangan merupakan aspek penting dalam pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari yang mencakup ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan bagi seluruh masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Dengan pengelolaan yang efektif, BUMDes dapat meningkatkan produksi pangan lokal, mengembangkan usaha pangan berbasis komunitas, dan meningkatkan infrastruktur serta akses distribusi. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, BUMDes desa Pucangsari dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan yang inovatif dan partisipatif.

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), ketahanan pangan terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup aktif dan sehat. Di Indonesia, pengertian ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, merata, dan lebih terjangkau. Dalam konteks pembangunan desa, ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan makanan, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memiliki posisi strategis dalam menciptakan sistem ketahanan pangan lokal melalui pemanfaatan potensi desa seperti pertanian.

Menurut Sutoro Eko (2015), pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes dapat menjadi motor penggerak dalam mewujudkan kemandirian desa, termasuk dalam hal pangan. Di Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, ketahanan pangan menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian utama BUMDes. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengelolaan sektor kegiatan pertanian lokal yang dikelola bersama kelompok tani. Pengelolaan ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan keluarga, dan distribusi hasil secara merata. Oleh karena itu, BUMDes tidak hanya berperan sebagai badan usaha semata, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi desa yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan tersedianya stok pangan yang menunjang kehidupan masyarakat sehingga tercapailah masyarakat yang sejahtera dikarenakan pangan mereka telah tercukupi secara merata dengan hadirnya BUMDes sebagai pengelola yang mendampingi pertanian dari para petani khususnya tanaman padi dan jagung yang ada di Desa Pucangsari.

E. Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Program Ketahanan Pangan Dari BUMDes Pucangsari

Kesejahteraan masyarakat desa merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kesejahteraan tersebut dapat dicapai apabila pengelolaan BUMDes dilakukan secara profesional, dan terstruktur yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Salah satu faktor kunci dalam pencapaian tujuan ini adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan BUMDes. Menurut Nurherawati, Ridwan, Apriani, & Alfalah (2025), pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja BUMDes. Di sisi lain, secara terintegrasi memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap peningkatan kinerja BUMDes. Keberhasilan BUMDes sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajerial, integritas, dan kompetensi SDM yang terlibat dalam pengelolannya. Tanpa SDM yang mumpuni, pengelolaan usaha desa cenderung stagnan dan tidak mampu berinovasi dalam menghadapi dinamika ekonomi lokal. Menurut Rusdi, Madaling, dan Said (2021) menunjukkan bahwa kemampuan manajerial berperan penting dalam meningkatkan kinerja pengurus BUMDes di Kabupaten Sidenreng Rappang. Kemampuan seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berkontribusi positif terhadap efektivitas kerja pengurus.

Selain sumber daya manusia, struktur organisasi BUMDes juga memegang peran penting dalam memastikan tata kelola yang akuntabel dan efisien. Struktur organisasi yang

jelas memungkinkan adanya pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang tepat, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program BUMDes dapat berjalan sistematis. Menurut Henri Fayol dalam teori manajemen klasiknya mengemukakan bahwa struktur organisasi yang baik harus didasarkan pada prinsip koordinasi, pembagian kerja, dan otoritas yang proporsional (Fayol, dalam Siagian, 2010). Sementara itu, ketahanan pangan juga menjadi sektor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui BUMDes. Ketersediaan dan keterjangkauan pangan lokal yang dikelola seperti pertanian dapat memperkuat stabilitas ekonomi desa. Menurut Sutoro Eko (2015), BUMDes dapat berperan strategis sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang mandiri, termasuk dalam memastikan ketahanan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat di Desa Pucangsari.

Kesejahteraan masyarakat Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari dengan hadirnya BUMDes "Lambung Arto" bisa dikatakan merata dan sepenuhnya tercapai dengan cara bertahap, masyarakat mulai merasakan manfaat melalui peningkatan akses layanan ekonomi, peluang kerja dll. BUMDes "Lambung Arto" telah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Desa Pucangsari lewat terciptanya ketahanan pangan di dalam pertanian sehingga tercapailah masyarakat yang sejahtera dikarenakan terpenuhinya ketersediaan pangan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai penelitian tentang ketahanan pangan yang ada di Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan judul penelitian yaitu "Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Program Ketahanan Pangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan". Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa BUMDes Desa Pucangsari memiliki peran yang cukup signifikan dalam pengelolaan program ketahanan pangan dengan cara menyuplai pupuk dan obat-obatan seperti pestisida kepada petani guna untuk menunjang tanaman padi dan jagung dari masa tanam hingga masa panen agar tanaman tersebut menghasilkan hasil yang lebih maksimal dikarenakan tanaman tersebut dapat nutrisi yang baik dan cukup serta terbebas dari penyakit ataupun hama yang menjadi kendala serta penghambat tanaman dalam pertumbuhan dan perkembangan menuju proses kematangan fisiologis, seperti berbunga dan berbuah sehingga ketika panen tiba hasil dapat lebih maksimal ataupun lebih banyak dan melimpah dari sebelumnya dikarenakan tanaman tersebut mendapatkan perawatan dengan baik dan teratur sehingga hasil dari tanaman tersebut meningkat. Sehingga terciptalah ketahanan pangan di desa dari hasil panen yang melimpah yang dapat mencukupi kebutuhan masyarakat dan disitulah kesejahteraan masyarakat terjadi dikarenakan tercukupinya kebutuhan pangan mereka lewat hasil pertanian mereka sendiri.
2. Dari hasil pertanian yang dikelola dengan baik dan terorganisir memberikan dampak yang positif dalam hal ketersediaan pangan. Masyarakat dapat memperoleh beras dengan kualitas yang baik dan harga yang lebih terjangkau karena rantai distribusi menjadi lebih pendek dan efisien. Dengan demikian, keberadaan hasil pertanian lokal tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membantu menekan biaya pengeluaran dalam rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa hasil

pertanian memiliki peran penting dalam menciptakan akses pangan bagi seluruh warga desa.

3. Terbukanya lapangan pekerjaan dari adanya pertanian padi dan jagung ntah itu berupa mereka” para petani ketika panen menyuruh para buruh tani untuk memanen padi ataupun jagungnya sekaligus menggilingnya sehinga terbukalah lapangan pekerjaan sebagai tambahan bagi mereka, ataupun orang” yang berpengangguran atau tidak dapat pekerjaan tetap sehingga menjadi pemasukkan keuangan bagi meraka dari pekerjaan itu ataupun dari segi yang lainnya yang berkaitan dengan seputar pertanian dan hasil dari pertanian guna memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan.
4. Hadirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam konteks penguatan ketahanan pangan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pengelolaan sektor pertanian secara langsung, BUMDes mampu memastikan ketersediaan pangan yang cukup, akses yang mudah, serta harga yang terjangkau bagi seluruh warga. Selain itu, keberadaan BUMDes turut menjaga stabilitas panen dan menjamin kualitas pangan yang dihasilkan. Dengan sistem distribusi yang efisien dan berbasis pada potensi lokal, pangan tidak hanya tersedia secara berkelanjutan, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Pada akhirnya, kehadiran BUMDes menjadi instrumen penting dalam mengelola pertanian desa secara berdaya guna dan berkelanjutan, yang berdampak langsung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61.*
- Ikmaludin, M. N. (2024, November). *Implementasi Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.* Law Specialist: Jurnal Ilmiah Hukum, 3(01), hlm. tentang PP No. 11 Tahun 2021 sebagai dasar implementasi di tingkat desa.
- Sen, A. (1981). *Poverty and famines: An essay on entitlement and deprivation.* Oxford: Oxford University Press.
- Sulistiyawati, & Prathama, I. K. (2024). *Strategi Pengembangan BUMDes “Banjarsari Berkah” di Desa Kedungturi Berdasarkan Permendesa PDPTT No. 3 Tahun 2021.* JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 12(2), 120–138.
- Desa Pucangsari. (2017, Februari 23). *Profil Desa Pucangsari Kecamatan Purwosari: Aspek sumber daya alam.* Wordpress.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2020). *The state of food security and nutrition in the world 2020: Transforming food systems for affordable healthy diets.* Rome: FAO.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Hilifalawu Kecamatan Huruna. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 717–723.
- The Liang Gie. (2000:5). *Administrasi sebagai Suatu Ilmu*. Yogyakarta: Liberty.
- Waldo, D. (1955). *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. New York: Ronald Press.
- Frederickson, H. G. (1997:4). *The Spirit of Public Administration*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Hughes, O. E. (2003:24). *Public Management and Administration: An Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.
- Terry, G. R. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen (terj. Winardi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Frederickson, H. G., & Smith, K. B. (2003). *The Pustration Theory Primer*. Boulder, CO: Westview Press.
- Sondang P. Siagian (2005) *dalam bukunya Manajemen Administrasi Publik*.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Handyaningrat, S. (2000). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Dunn, W. N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction (3rd ed.)*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- Eko, S. (2015). *Membangun Desa Membangun Indonesia: Panduan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Implementasi UU Desa*. Yogyakarta: STPN Press.
- Linton, R. (1936). *The study of man: An introduction*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Nurberawati, N., Ridwan, R., Apriani, D., & Alfalah, R. (2025). *Pengaruh pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi BUMDes (SLABUMDes) terhadap kinerja BUMDes di Kabupaten Tasikmalaya*. YUME: Journal of Management, 8(1).
- Rusdi, M., Madaling, M., & Said, S. (2021, terbit online 2022 menurut repositori). *Kemampuan manajerial terhadap kinerja pengurus BUMDes di Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Manajemen Kewirausahaan, 18(2), 163–172.
- Maslow, A. H. (1943). *A theory of human motivation*. Psychological Review, 50(4), 370–396.
- Sogian. (2010). *Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Henri Fayol dalam Organisasi Modern*. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 17(2), 45–52.
- Arikunto, S. (2013:172). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kadji, Y. (2016 : 147). *Metode Penelitian Kualitatif*. Gorontalo: Ideas Publishing.